

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, S. M. I., et al. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Amalia, U. P., & Rahmatika, N. D. (2022). Tinjauan Proses Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Edu Tech Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 2 No 2, 106-120.
- Andriyanto, W. R., & Damayanti. (2017). *Praktikum PPN & PPnBM*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anwari, A., & Bandiyono, A. (2021). Analisis Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau. *EDUCORETAX*. Vol. 1 No 1, 1-13.
- Dahlan, A., & Susyanti, J. (2020). *Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha*. Malang: Empatdua Media.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*.
- Fauzi, R., J. (2020). *Algoritma dan Flowchart dalam Menyelesaikan Suatu Masalah*. Makalah ini disampaikan dari Universitas Janabdra Yogyakarta.
- Harahap, P. C., et al. (2023). Perancangan Sistem Jadwal Perkuliahan di Kampus Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 7 No 2, 16127-16136.
- Kardiyati, N. E., & Karim, A. (2020). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Cirebon Tahun 2016–2018). *BALANCE: Economic, Business, Management, and Accounting Journa*. Vol. 17 No 2, 87-89.
- Kementerian Keuangan. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)*.

- Kementerian Keuangan. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
- Kementerian Keuangan. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Hingga Akhir Oktober 2023, Pendapatan Negara Terjaga Tetap Positif*. Diakses tanggal 20 Maret 2024 dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/apbn-kita-nov-pendapatan>
- Kementerian Keuangan. (2021). *Pajak Pertambahan Nilai*. Diakses tanggal 22 Juni 2024 dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Keuangan. (2023). Kinerja APBN 2024 Tetap Kuat dan Adaptif Mengantisipasi Risiko. Diakses tanggal 20 Maret 2024 dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>
- Mardiana, Hidayatullah, S. R., & Julaeha, S. (2021). Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pendaftaran Dan Seleksi Calon Pemegang Dengan Metode SAW Berbasis Website Pada PT JIAEC Di Depok. *Indonesian Journal on Networking and Security*. Vol. 10 No 2, 127-134.
- Pakpahan, F. A., et al. (2021). Metodologi Penelitian Ilmiah. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Pratiwi, I. N., Sriyanti, E. W. N., & Satria, I. W. (2023). Pendampingan Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Klien LMATS Consulting. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. Vol. 7 No 5, 4867-4876.
- Purba, E., et al. (2021). Metode Penelitian Ekonomi. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Rahmawati, D. I. (2018). Buku Ajar Sistem Informasi Akuntansi. Sidoarjo: UMSIDA Press.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
- Republik Indonesia. (1983). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Sari, I., P. (2023). *Perlakuan restitusi pajak pertambahan nilai pada PT Setia Karya Transport*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Virginia, S. (2021). *Analisis Mekanisme Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai Serta Perbandingan Cara Pengembalian Normal dan Pendahuluan Dalam Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO)*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta